



Pendidikan Nilai dalam Era Pluralitas: upaya membangun solidaritas sosial

Ruslan Ibrahim *)

*) Penulis adalah alumni Jurusan Tarbiyah STAIN (sekarang IAIN Mataram). Menyelesaikan Program Magister Konsentrasi Pemikiran Pendidikan Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan pada tempat yang sama, sekarang sedang menempuh Program Doktor Konsentrasi Studi Islam.

Abstract: Values education is activity which help students in order that they have instruction which determine all of their actions. Values education is considered urgent in education activity. It is purposed to build social solidarity, especially in religion and cultural plurality era. The reality of social, religion, and cultural conflict, showed education functions as transfer of moral values still optimal yet. Therefore, values education include moral training must be applied to help students be up against social problems in their life. **Keywords:** *values education, plurality, moral training, social solidarity.*

Pendahuluan

Hubungan antara nilai dengan pendidikan sangat erat. Nilai dilibatkan dalam setiap tindakan pendidikan, baik dalam memilih maupun dalam memutuskan setiap hal untuk kebutuhan belajar. Melalui persepsi nilai, pendidik dapat mengevaluasi peserta didik. Demikian pula peserta didik dapat mengukur kadar nilai yang disajikan pendidik dalam proses pembelajaran. Masyarakat juga dapat merujuk sejumlah nilai (benar-salah, baik-buruk, indah-tidak indah) ketika mereka mempertimbangkan kelayakan pendidikan yang dialami anaknya.

Lembaga pendidikan memiliki tugas mempersiapkan terbentuknya individu-individu yang cerdas dan berakhlak mulia. Terpenuhinya kedua kriteria itu memungkinkan terwujudnya nilai kehidupan sosial yang ideal, yang memiliki semangat kebersamaan, menghindari konflik sosial, mengembangkan potensi diri, dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin, serta keselamatan umat manusia pada umumnya.¹

Hal tersebut menunjukkan bahwa peran pendidikan dalam pembentukan dan penanaman nilai terhadap peserta didik sangat menentukan kehidupan mereka. Tanpa pendidikan, nilai sangat sulit untuk ditemukan atau didapatkan. Oleh karena itu, fungsi pendidikan adalah untuk menanamkan nilai-nilai (yang baik) kepada peserta didik (bukan hanya transfer pengetahuan) sebagaimana yang populer selama ini. Pengetahuan tanpa memahami nilai cenderung melahirkan konflik, baik antar-kelompok agama, budaya, wilayah, maupun antar-institusi.²

Konflik-konflik yang muncul di tanah air akhir-akhir ini sangat terkait dengan aspek sosial, budaya, dan agama. Menurut penulis, hal ini disebabkan lemahnya peran pendidikan yang menanamkan nilai kebersamaan dan solidaritas sosial dalam era pluralitas. Membangun nilai kebersamaan dan solidaritas



sosial bukanlah pekerjaan mudah, tetapi menuntut pendidikan nilai yang dilakukan secara terus-menerus dengan penjiwaan setiap orang.

Mamahami Pendidikan Nilai

Untuk memahami pendidikan nilai, terlebih dahulu penulis kemukakan pengertian nilai. Istilah nilai memiliki banyak pengertian, tergantung dari sudut pandang mana seseorang memahaminya. Sosiolog, antropolog, psikolog, ekonom, serta politisi mempunyai persepsi dalam memaknai nilai. Pada intinya, memahami nilai itu bersifat subjektif. Dalam tulisan ini, nilai diartikan sebagai penentu seseorang dalam melakukan suatu tindakan yang positif atau nilai dapat juga disebut perilaku moral.

Nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan suatu pilihan.³ Oleh karena nilai sebagai rujukan dalam bertindak, maka setiap orang harus memperhatikan lebih mendalam agar hati-hati dan berpikir rasional sebelum mengambil tindakan. Seseorang yang bertindak tanpa dasar rujukan yang kuat dapat dianggap tidak memiliki dan memahami nilai moral. Menurut Judy Lawly, nilai merupakan pedoman kepercayaan yang mendalam mengenai suatu hal yang penting. Nilai secara langsung mempengaruhi perilaku dan tertanam kuat dalam kebudayaan masyarakat dan latar belakang keluarga.⁴

Schwartz mendefinisikan “*values as goals and motivations which serve as guiding principles in people’s lives*”.⁵ Artinya, nilai sebagai tujuan dan motivasi yang berperan sebagai prinsip-prinsip petunjuk dalam kehidupan manusia. Apabila nilai telah mempribadi dalam kehidupan seseorang, maka akan tampak dalam pola-pola sikap, niat dan perilakunya. Menurut Merrill, nilai adalah patokan atau standar pola-pola pilihan yang dapat membimbing seseorang atau kelompok ke arah “*satisfaction, fulfillment, and meaning*”.⁶ Patokan, kriteria, prinsip-prinsip, dan ukuran yang memberi dasar pertimbangan kritis tentang pengertian, estetika, kewajiban moral, dan religius.

Jadi, pendidikan nilai adalah penanaman dan pengembangan nilai-nilai pada diri seseorang. Mardiatmaja mengemukakan pendidikan nilai sebagai bantuan terhadap peserta didik agar menyadari dan mengalami nilai-nilai serta menempatkannya secara integral dalam keseluruhan hidupnya.⁷ Dengan demikian, pendidikan nilai tidak hanya merupakan program khusus yang diajarkan melalui sejumlah mata pelajaran, tetapi mencakup pula keseluruhan proses pendidikan. Dalam hal ini, yang menanamkan nilai kepada peserta didik bukan saja guru pendidikan nilai dan moral serta bukan saja pada saat mengajarkannya, melainkan kapan dan di manapun, nilai harus menjadi bagian integral dalam kehidupan.

Dari definisi di atas dapat ditarik suatu definisi pendidikan nilai yang mencakup keseluruhan aspek sebagai pengajaran atau bimbingan kepada peserta didik agar memiliki modal nilai yang menjadi prinsip dan petunjuk dalam kehidupannya. Dengan demikian, mereka menyadari nilai kebenaran, kebaikan, kebersamaan, dan keindahan melalui proses pertimbangan nilai yang tepat dan pembiasaan bertindak yang konsisten. Penekanannya terletak pada peran pendidikan sebagai transformasi nilai sehingga menjadi bagian yang integral dalam diri peserta didik. Dengan memiliki nilai moral, maka segala tindakan peserta didik akan terkontrol karena dilakukan dengan pertimbangan nilai yang matang.



Pendidikan nilai bertujuan membantu peserta didik agar memahami, menyadari, mengalami nilai-nilai, serta mampu menempatkannya secara integral dalam kehidupan. Untuk sampai pada tujuan dimaksud, tindakan-tindakan pendidikan yang mengarah pada perilaku yang baik dan benar perlu diperkenalkan oleh para pendidik sehingga menghasilkan *out-put* yang bertindak berdasarkan nilai moral.

Dalam proses pendidikan nilai, tindakan-tindakan pendidikan yang lebih spesifik dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang lebih khusus. Seperti dikemukakan komite *Asia and the Pacific Programme of Educational Innovation for Development* bahwa pendidikan nilai secara khusus ditujukan untuk; (1) menerapkan pembentukan nilai kepada anak, (2) menghasilkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai yang diinginkan, dan (3) membimbing perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai tersebut.⁸ Dengan demikian, tujuan pendidikan nilai meliputi tindakan mendidik yang berlangsung mulai dari usaha penyadaran nilai sampai pada perwujudan perilaku-perilaku yang bernilai.

Menurut Mardiatmadja, pendidikan nilai bertujuan membantu peserta didik untuk menyadari dan mengalami nilai-nilai, menyumbangkan, serta menempatkan secara integral dalam keseluruhan hidup mereka. Pendidikan nilai merupakan usaha khusus, tetapi juga dapat disebut sebagai dimensi dalam keseluruhan usaha pendidikan. Pendidikan semacam ini semakin penting karena kesadaran nilai oleh masyarakat semakin tinggi. Ada tiga hal yang menjadi sasaran pendidikan nilai. *Pertama*, membantu peserta didik untuk menyadari makna nilai dalam hidup manusia. *Kedua*, membantu pendalaman dan pengembangan pemahaman serta pengalaman nilai. *Ketiga*, membantu peserta didik untuk mengambil sikap terhadap aneka nilai dalam perjumpaan dengan sesama agar dapat mengarahkan hidupnya bersama orang lain secara bertanggungjawab.⁹ Bahkan, ada anggapan bahwa pendidikan nilai bukan sesuatu yang hanya bisa ditambahkan atau boleh dikaitkan dengan pendidikan, melainkan sesuatu yang harus ada bersamaan dengan pendidikan dan memiliki posisi sentral.

Yang penting dari pendidikan nilai adalah menanamkan nilai-nilai kepada peserta didik untuk menangkis pengaruh nilai-nilai negatif yang cenderung mendorong moral hanyut dalam globalisasi dan perubahan zaman yang negatif. Nilai-nilai yang diakibatkan oleh derasnya arus globalisasi, misalnya konsumerisme, hedonisme, dan individualisme. Nilai-nilai tersebut, dalam konteks sosiologis tidak dapat dipertahankan lagi karena dapat mengurangi keharmonisan dalam kehidupan bersama. Jika demikian, nilai moral sosial yang harus ditanamkan kepada peserta didik adalah nilai keadilan sosial, cinta kasih terhadap sesama, peduli terhadap orang lain, tenggang rasa, dan solidaritas sosial.¹⁰ Dalam era pluralitas agama dan budaya seperti sekarang, nilai-nilai moral sosial tersebut harus menjadi bagian penting untuk diperhatikan oleh para pendidik (guru atau orang tua) sehingga peserta didik betul-betul menjiwainya.

Pluralitas Agama dan Budaya

Pluralisme dan pluralitas adalah dua kata yang sering dipakai secara bergantian tanpa ada penjelasan tentang apakah dua kata ini mempunyai arti yang sama atau berbeda. Ada kalanya pluralisme dan



pluralitas mempunyai arti yang sama, yaitu keadaan yang bersifat plural, jamak, atau banyak.¹¹ Terlepas dari konsep tersebut, yang dimaksud dengan pluralitas adalah realitas kemajemukan agama dan budaya di tanah air. Pluralitas atau kemajemukan agama dan budaya adalah sesuatu yang bersifat alami dan kodrati bagi bangsa Indonesia. Oleh karenanya, bangsa Indonesia begaimanapun juga tidak bisa menghilangkan kemajemukan tersebut.¹²

Sebagai istilah yang bermakna 'majemuk', dalam realitasnya, pluralitas hadir membawa dua sisi secara bersamaan. Pada satu sisi, pluralitas membawa rahmat dan pada sisi lainnya membawa permasalahan-permasalahan tertentu yang pada suatu saat menakutkan masyarakat jika terjadi saling menyalahkan agama dan budaya tertentu.¹³ Dengan keanekaragaman, kehidupan manusia dapat berbagi antara satu dengan lainnya. Mereka juga dapat memupuk nilai-nilai peradaban bersama dan memperkuat tali persaudaraan sosial (*social solidarity*) untuk mencapai kehidupan yang ideal. Sekalipun di dalamnya terjadi bentrokan, namun diupayakan tidak sampai merusak tatanan sosial masyarakat luas, dan karenanya masyarakat yang hidup di dalamnya mesti dibekali dengan modal kesetiakawanan, solidaritas, dan toleransi.

Pluralitas etnik, kultural, keagamaan di manapun di dunia ini adalah fakta yang tidak dapat diingkari karena pluralitas itu merupakan hukum alam. Mengingkari pluralitas adalah mengingkari hukum alam. Yang menjadi persoalan bukan pluralitas itu sendiri, melainkan bagaimana sikap kita terhadap pluralitas.¹⁴ Etnik atau ras, agama, dan budaya seorang bukan ditentukan oleh pilihannya, tetapi ditentukan oleh keturunannya. Apakah adil atau bermoral jika membenci seseorang karena perbedaan agama dan budaya yang bukan pilihannya dengan agama dan budaya yang kita anut? Jika pertanyaan ini dikaji lebih serius maka konflik sosial agama dan budaya yang tidak berdasarkan nilai moral tidak akan terjadi lagi.

Kemajemukan ini merupakan kekayaan, yang apabila dapat diarahkan kepada nilai-nilai positif akan mendatangkan nilai-nilai positif pula. Akan tetapi, kemajemukan juga apabila ditafsirkan dalam arti sempit bisa membawa kepada perpecahan dan disintegrasi, seperti kasus-kasus yang telah terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu, sikap yang harus diambil oleh bangsa Indonesia bukan bagaimana menghilangkan kemajemukan, tetapi bagaimana supaya nilai solidaritas sosial bisa diwujudkan, bisa hidup berdampingan secara damai dan aman, penuh toleransi, saling menghargai dan memahami antara anak bangsa yang berbeda suku, bahasa, budaya dan agama. Salah satu upaya perekatnya adalah melalui pendidikan nilai.

Urgensi Pendidikan Nilai

Di tengah derasnya arus globalisasi dan informasi yang dirasakan bangsa Indonesia saat ini, persoalan pluralitas agama dan budaya menjadi perbincangan panjang, baik oleh akademisi, cendekiawan, maupun para tokoh dari berbagai agama di tanah air. Perbincangan yang berlanjut ini merupakan realitas kegelisahan umat beragama yang belum menemukan titik temu dalam perdamaian dan keharmonisan. Masing-masing penganut agama dan budaya mengklaim kebenaran bahwa agama



dan budayanya yang paling benar dan absah. Karena hal ini sudah mendarahdaging, maka bentuk konflik dan kekerasan semakin menjadi dan berkembang. Padahal, konflik dan kekerasan sosial dimuka bumi sesungguhnya bukan bersumber dari ajaran dan perintah agama dan bukan pula anjuran kultural dari budaya tertentu.

Lahirnya persoalan-persoalan di atas tidak lepas dari 'kekalahan' nilai moral kemanusiaan yang kurang terintegral dalam kehidupan seseorang atau kelompok. Dalam hal ini, pendidikan tidak cukup dimaknai dan berfungsi sebagai *transfer of knowledge*, melainkan yang lebih penting dalam konteks pluralitas agama dan budaya adalah berfungsi sebagai *transfer of values*. Nilai yang ditransferkan adalah nilai-nilai moral yang mencakup toleransi, solidaritas sosial (kesetiakawanan), kedamaian, kebersamaan, dan saling menghargai dan menghormati walaupun berbeda secara ideologis-kultural. Nilai yang ditransferkan dalam aktivitas pendidikan tersebut adalah nilai abstrak-teoretis dan harus diaplikasikan dalam kehidupan di tengah masyarakat yang plural.

Bentuk pluralitas sudah jelas sebagaimana dalam praktik kehidupan Nabi Muhammad SAW, di mana beliau pada waktu itu sekaligus sebagai pemimpin Madinah. Beliau dan masyarakat muslim hidup berdampingan dengan masyarakat yang beragama *abrahamic religion* (Yahudi dan Nasrani) dengan penuh kedamaian, sesuai dengan konsep al-Qur'an sebagai teks potensial dan terbuka untuk diinterpretasi.¹⁵

Sistem nilai di atas penting untuk selalu diajarkan pada peserta didik agar lembaga pendidikan tetap dapat mengembangkan dan menanamkan ajaran-ajaran yang menyangkut persoalan moral, etik sosial, dan sistem nilai positif lainnya pada diri peserta didik. Peserta didik yang cerdas, tetapi tidak memiliki sistem nilai yang positif, tidak akan banyak memberikan sumbangsuhnya bagi kesejahteraan masyarakat.¹⁶ Hal ini berarti lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi perlu diajarkan sistem nilai yang positif. Tujuannya agar mereka memiliki kecerdasan dan kepedulian sosial untuk kebaikan masyarakat dan umat manusia pada umumnya. Pemikir muslim, Fazlur Rahman mengemukakan pentingnya pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Menurutnya, agar umat Islam dapat memasukan nilai-nilai Islam sebagai landasan pendidikan, maka harus melibatkan dua aspek yang saling berhubungan. *Pertama*, membentuk mental peserta didik dengan nilai-nilai Islam bagi kepentingan kehidupan pribadi dan kolektif. *Kedua*, memasukan nilai-nilai Islam (kejujuran, keadilan, kesungguhan, keikhlasan, kesabaran, dan sebagainya) ke dalam bidang-bidang studi yang lebih tinggi.¹⁷ Apa yang dimaksudkan oleh Fazlur Rahman agar aktivitas pendidikan yang berdasarkan Islam memiliki manfaat individu dan bersama untuk membangun hubungan yang lebih harmonis antarsesama manusia tanpa diskriminasi agama dan budaya. Sementara itu, memasukan nilai-nilai Islam yang dimaksud adalah mengintegrasikan ke dalam bidang studi bidang agar pendidikan mengandung *transfer of moral values*.

Menurut Weiner, ada tiga faktor yang menunjukkan pentingnya pendidikan, termasuk pendidikan nilai dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang majemuk.¹⁸ *Pertama*, melalui pendidikan dapat menghantarkan manusia agar dapat mengelolah teknologi dan memajukan ekonominya. *Kedua*,



melalui pendidikan untuk mempersatukan semua kelompok masyarakat dari berbagai macam budaya dan suku ke dalam suatu negara. *Ketiga*, sebuah negara politik di dunia modern dapat *survive* bilamana para pejabat negara tersebut dapat berkoordinasi secara administratif melalui wilayah yang cukup luas. Semua itu membutuhkan pendidikan.

Tilaar mengatakan, paling tidak urgensi pendidikan nilai moral, disebabkan tiga hal penting.¹⁹ *Pertama*, lemahnya pendidikan keluarga. Keluarga yang secara tradisional merupakan pendidik pertama dari setiap anak, mulai kehilangan fungsinya. Dengan demikian, terjadi kekosongan moral dalam perkembangan hidup anak. Kehidupan keluarga memiliki pengaruh yang menentukan masa depan anak. Jika kehidupan keluarga memberikan pendidikan yang bermanfaat baik bagi anak, maka anak tersebut memiliki masa depan yang dapat diharapkan karena mereka telah dididik dengan nilai moral dan etika sosial yang matang,

Kedua, kecenderungan negatif dalam kehidupan pemuda. Misalnya, di kota-kota besar terjadi perkelahian antarpelajar, peserta didik, etnis, dan lain-lain. Hal ini diakibatkan oleh disintegrasi keluarga seperti *poor-parenting*. Mereka telah kehilangan pegangan dan keteladanan. Selain menimpa generasi muda, lemahnya nilai moral dialami oleh para pejabat dari tingkat terendah sampai tertinggi. Mereka dengan ringan hati melakukan KKN dengan menghabiskan uang negara yang cukup banyak.

Ketiga, suatu kebangkitan kembali nilai-nilai etik. Di berbagai belahan dunia, masyarakat mulai menyadari urgensinya nilai-nilai etik bagi kehidupan. Oleh karena itu, untuk mendukung hal ini para orangtua, pengajar, dan siapa saja harus bekerjasama dalam rangka menumbuhkan semangat nilai moral bagi kehidupan generasi muda. Mereka perlu disadarkan pada pentingnya kehidupan bersama dengan menghormati nilai-nilai dasar, seperti saling percaya, menghargai, menghormati, berlaku jujur, dan solidaritas sosial terhadap sesama.

Bidang pendidikan, khususnya pendidikan nilai-nilai keagamaan (moral) dapat menjadi cara yang memungkinkan terjadinya saling menghargai antara satu kelompok dengan kelompok lain sehingga tercipta suatu kehidupan yang damai dan harmonis. Menurut Bahtiar Effendy, hal tersebut dikarenakan pendidikan seringkali dipandang sebagai instrumen untuk melakukan perubahan, khususnya yang berkaitan dengan nilai dan sikap mental. Pendidikan masih dinilai sebagai infrastruktur paling memungkinkan untuk transformasi nilai-nilai sosial kemanusiaan.²⁰

Pendidikan merupakan wahana untuk menanamkan hakikat dan praktik pluralistik bagi peserta didik. Filsafat pluralisme dalam pendidikan tidak terbatas pada aspek pendidikan saja, tetapi mencakup pula berbagai aspek kemasyarakatan yang dapat mempengaruhi proses pendidikan. Guru dan masyarakat luas dapat menangkap makna pluralitas melalui dialog dan partisipasi. Lembaga pendidikan diharapkan menanamkan kesadaran pluralisme lewat berbagai kegiatan sekolah, seperti penyampaian materi/ bahan ajar, kegiatan lokakarya, peringatan hari-hari besar nasional, dan kegiatan ekstrakurikuler yang lain.²¹ Tidak jarang pendidikan pluralistik ini disebut pendidikan multikultural, meskipun istilah ini tidak tepat, tetapi paling tidak dapat digunakan sebagai tahap transisi.



Pendidikan dalam realitas plural hendaknya bertumpu pada adanya *social reproduction*.²² Artinya, apa yang dilaksanakan dalam dunia pendidikan dewasa ini akan berbuah di masa mendatang. Pendidikan yang mengajarkan sikap sopan santun dan budi pekerti yang baik, kelak akan memunculkan nilai sopan santun, budi pekerti, dan begitu juga sebaliknya. Jika pendidikan menanamkan jiwa pluralistik, maka kelak akan melahirkan peserta didik di mana masing-masing dapat hidup dan berperilaku layak dalam masyarakat pluralistik. Oleh karena itu, dalam pendidikan nilai diperlukan kesadaran di kalangan pendidik atas *social reproduction* tersebut dan dapat mengarahkan untuk membentuk pandangan, nilai-nilai, sikap, dan perilaku pluralitas anak didik dalam masyarakat pluralistik.

Pemahaman, kesadaran, dan perilaku yang sesuai dalam masyarakat pluralistik bermuara pada demokrasi.²³ Pada dasarnya masyarakat pluralistik, demokrasi, dan persamaan derajat, serta menghargai hak-hak individu merupakan prinsip yang utama. Demokrasi adalah suatu kerangka untuk hidup, baik bagi individu maupun kelompok berdasarkan informasi yang dikaji bersama dan diputuskan bersama. Untuk itu, peran pendidikan sangat menentukan bagaimana masyarakat bisa hidup bersama dalam konteks pluralitas. Semakin tinggi tingkat derajat demokrasi, maka semakin tinggi derajat pendidikan yang diperlukan. Namun demikian, bila demokrasi sering dijadikan sebagai alat politik untuk berkuasa, maka cenderungnya berefek negatif.

Apabila peserta didik akan dipersiapkan menjadi manusia yang berkeadaban dan memiliki solidaritas sosial dalam masyarakat majemuk, maka menurut Mochtar Buchori, harus diajarkan kepada mereka tiga hal.²⁴ *Pertama*, kesadaran tentang keharusan untuk mempertahankan kebebasan dalam masyarakat majemuk dan kearifan dalam memanfaatkan kebebasan (memahami batas-batas kebebasan pribadi dan orang lain). Kebebasan dalam hal ini tidak dapat diartikan sebagai kebebasan tanpa batas karena dalam aktivitas pendidikan pada umumnya tidak ada yang bebas nilai. Dalam pribadi peserta didik, nilai-nilai solidaritas atau kesetiakawanan perlu ditampakkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kedua, kemampuan untuk mengetahui kesempatan yang ada dan “mencium” (*smelling*) peluang-peluang yang akan berkembang dalam masyarakat. Peserta didik jangan hanya diajarkan pengetahuan yang didasarkan pada buku-buku teks pelajaran, melainkan juga ketrampilan sosial atau ketrampilan hidup (*social skill or life skill*) yang dapat menjawab tantangan kehidupan mereka di tengah masyarakat luas. *Ketiga*, membuang segenap prasangka terhadap sesama warga, anggota, dan orang yang beragama lain, berasal dari suku atau ras lain, dan mempunyai pandangan politik atau kemasyarakatan yang lain. Prasangka adalah sifat yang dapat melahirkan konflik sosial. Sifat ini tentu saja tidak sesuai dengan kenyataan pluralitas agama dan budaya. Dalam era pluralitas agama dan budaya, yang harus ‘ditumbuhsururkan’ adalah solidaritas sosial agar hidup bermasyarakat dapat berjalan dengan damai dan harmonis.

Pelatihan Moral



Sebagai upaya membantu peserta didik agar dapat menghayati nilai-nilai moral yang telah dikenal dan disadari, maka pendidikan nilai perlu memuat pelatihan moral. Pelatihan moral dimaksudkan untuk membentuk sikap hati dan melatih kehendak peserta didik untuk membiasakan diri bertindak sesuai prinsip, norma, dan aturan moral yang berlaku dalam masyarakatnya.²⁵ Pendidikan nilai moral dengan kata lain memiliki tiga aspek sekaligus, yaitu kognitif, afektif, dan konatif.

Aturan yang berlaku dalam masyarakat dilahirkan oleh masyarakat dengan penuh pertimbangan. Pertimbangan pluralitas agama dan budaya tidak ketinggalan karena pluralitas memiliki kompleksitas problem. Problem pluralitas cenderung melahirkan konflik dan kekerasan antarindividu, golongan, agama, dan budaya. Oleh karena itu, dalam pendidikan nilai harus dicakupkan pelatihan moral sebagai salah satu metode pembiasaan bagi peserta didik agar mereka menjiwai nilai kemajemukan dan solidaritas sosial sebagaimana ditekankan di atas.

Pendidikan nilai tanpa pelatihan moral yang membiasakan peserta didik untuk bertindak arif dan bijak dalam kehidupannya, dapat dikatakan belum berhasil karena pendidikan nilai bertujuan sebagai petunjuk bagi peserta didik agar menghayati dan berperilaku sesuai dengan petunjuk tersebut. Petunjuk dalam pendidikan nilai adalah petunjuk bagi peserta didik yang memuat nilai solidaritas sosial sehingga mereka dapat mengambil pelajaran dari kehidupan bermasyarakat yang pluralistis. Dalam hal ini, pelatihan moral yang membiasakan peserta didik agar menjiwai nilai-nilai moral dapat menjadi jalan keluar bagi pendidikan nilai dalam era pluralitas agama dan budaya. Pelatihan moral tidak hanya bisa dilaksanakan oleh lembaga pendidikan sekolah, tetapi peserta didik akan lebih menjiwai nilai-nilai di atas, jika pendidikan keluarga dan masyarakat lebih berperan dari pendidikan sekolah.

Penutup

Pluralitas agama dan budaya harus dipahami sebagai realitas alami yang sengaja dihadirkan oleh Tuhan kepada umat manusia yang dicintainya. Kenyataannya umat manusia tidak serius memahami pluralitas sehingga yang terjadi kekerasan dan konflik sosial agama. Munculnya kekerasan merupakan akibat yang ditimbulkan oleh lemahnya peran pendidikan, khususnya pendidikan nilai moral. Nilai moral adalah nilai positif yang mendukung terjalinnya hubungan sosial manusia yang damai, harmonis, penuh dengan solidaritas, dan tidak diskriminatif terhadap orang lain yang berbeda secara ideologis kultural.

Peran pendidikan nilai moral harus menjadi bagian terdepan untuk menangkis berbagai nilai negatif yang akan lahir sebagai akibat oleh berbagai aspek, seperti globalisasi. Oleh karena itu, nilai moral harus ditanamkan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup berdampingan dengan orang lain dan tidak menimbulkan kekerasan atau konflik dalam era pluralitas agama dan budaya seperti sekarang ini. Fungsi sosial pendidikan sebagai *transfer of moral values* harus diutamakan daripada fungsinya yang lain. Nilai yang ditransferkan tentunya nilai-nilai positif yang diuraikan di atas. Jika peran pendidikan sebagai transfer nilai diutamakan maka hasilnya pun akan melahirkan orang-orang yang terdidik dan manusiawi serta tidak bermasalah.



Endnote

- ¹ A. Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Fajar Dunia, 1999).
- ² Terkait dengan masalah tersebut, dapat dibaca dalam Sudarminta, "Pendidikan Moral di Sekolah Jalan Keluar Mengatasi Krisis Bangsa" dalam Tonny D. Widiastono (Ed), *Pendidikan Manusia Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2004), hal. 106-7.
- ³ Rochmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai* (Bandung: Alfabeta, 2004), hal. 8-10.
- ⁴ Judy Lawly, "Living Values School" dalam (<http://www.nzpf.ac.nz/resources/maga-zine/b4-2000/arti-cles/living.html>).
- ⁵ Pendapat Schwartz yang dikutip oleh L. Myyry & K. Helkama, "The Role of Value Priorities and Professional Ethics Training Moral Sensitivity", dalam *The Journal of Moral Education*, Volume 31 Number 1 March, 2002, hal. 37.
- ⁶ Pendapat Merrill yang diambil oleh I Wayan Koyan, *Pendidikan Moral Pendekatan Lintas Budaya* (Jakarta: Dirjend Dikti Depdiknas, 2000), hal. 12.
- ⁷ Mardiatmadja, *Tantangan Dunia Pendidikan* (Yogyakarta: Kanisius, TT).
- ⁸ Mulyana, *Mengartikulasikan*, hal. 119-120.
- ⁹ Mardiatmadja, *Tantangan*, hal. 55-6. Terkait dengan hal tersebut, dapat dibaca dalam Joan Stephenson, et., al., *Values in Education* (New York: Routledge, 1998), hal. 162-163.
- ¹⁰ J. Soedjati Djiwandono, "Globalisasi dan Pendidikan Nilai" dalam Sindhunata (Ed), *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan: Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal. 110.
- ¹¹ Kautsar Azhari Noer, "Pluralisme dan Pendidikan di Indonesia: Menggugat Ketidakberdayaan Sistem Pendidikan Agama" dalam Th. Sumartana, dkk., *Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Interfidei, 2001), hal. 224.
- ¹² Ditinjau dari segi etnik, budaya, geografis, dan agama, bangsa Indonesia berada dalam realitas kemajemukan (plural). Secara geografis bangsa Indonesia memiliki lebih dari tujuh belas ribu pulau besar dan kecil serta lebih dari tiga ratus suku, dan menganut berbagai agama dan kepercayaan. Lihat penjelasan Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 164-5.
- ¹³ Abdul Wahid, *Pluralisme Agama, Pascamodernisme, dan Pendidikan Agama di Indonesia* (Tesis Magister, Yogyakarta: UNY, 2002), hal. 2-3.
- ¹⁴ Th. Sumartana, dkk., *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Interfidei, 2001), hal. 225. Kaitannya dengan pluralitas budaya, menurut Kuntowijoyo, ada tiga teori tentang hubungan budaya dalam masyarakat majemuk, yaitu etnosentrisme, *meltingpot* (peleburan), dan pluralisme. Etnosentrisme terjadi bila masing-masing budaya bersikukuh dengan identitasnya, dan menolak bercampur tangan dengan kebudayaan lain. *Meltingpot* ialah peleburan komponen-komponen etnis ke dalam hanya satu identitas baru. Sementara pluralisme dimaksudkan bahwa masing-masing etnisitas tetap memegang identitas kelompoknya, tetapi dalam beberapa hal ada identitas yang sama. Lihat Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung: 1997), hal. 155.
- ¹⁵ Mohammed Arkoun, *Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Jalan dan Tantangan Baru* (Jakarta: INIS, 1994), hal. 195.
- ¹⁶ Suyanto & Jihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium III* (Yogyakarta: Adi Cita, 2000).
- ¹⁷ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), hal. 131.
- ¹⁸ Myron Weiner (Ed), *Modernization: The Dynamics of Growth* (Cambridge: Voice of America Forum Lecture, 1966), hal. 74.
- ¹⁹ H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), hal. 74-75.



²⁰ Bahtiar Effendy, *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan: Perbincangan Mengenai Islam, Masyarakat Madani, dan Etos Kewirausahaan* (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hal. 45.

²¹ Zamroni, *Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society* (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2001), hal. 80-81.

²² *Ibid.*, hal. 82.

²³ *Ibid.*, hal. 83.

²⁴ Mochtar Buchori, *Pendidikan Antisipatoris* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hal. 108-9.

²⁵ Sudarminta, *Pendidikan*, hal. 109.

Daftar Pustaka

- Arkoun, Mohammed. 1994. *Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Jalan dan Tantangan Baru*. Jakarta: INIS.
- Buchori, Mochtar. 2001. *Pendidikan Antisipatoris*. Yogyakarta: Kanisius.
- Daulay, Haidar Putra. 2004. *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional* Jakarta: Kencana.
- Djiwandono, J. Soedjati. 2000. "Globalisasi dan Pendidikan Nilai" dalam Sindhunata (Ed), *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan: Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Effendy, Bahtiar. 2001. *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan: Perbincangan Mengenai Islam, Masyarakat Madani dan Etos Kewirausahaan*. Yogyakarta: Galang Press.
- Fadjar, A. Malik. 1999. *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Fajar Dunia.
- Koyan, I Wayan. 2000. *Pendidikan Moral Pendekatan Lintas Budaya*. Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas.
- Kuntowijoyo. 1997. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan.
- Lawly, Judy. 2000. "Living Values School" dalam (<http://www.nzpf.ac.nz/resour-ces/maga-zine/b4-2000/articles/living.html>).
- Mardiatmadja. TT. *Tantangan Dunia Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mulyana, Rochmat. 2004. *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta.
- Myry, L. & K. Helkama. 2002. "The Role of Value Priorities and Professional Ethics Training Moral Sensitivity", dalam *The Journal of Moral Education*, Volume 31 Number 1 March.
- Noer, Kautsar Azhari. 2001. "Pluralisme dan Pendidikan di Indonesia: Menggugat Ketidakberdayaan Sistem Pendidikan Agama" dalam Th. Sumartana, dkk., *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia* Yogyakarta: Interfidei.
- Rahman, Fazlur. 1982. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Joan Stephenson, et., al. 1998. *Values in Education*, New York: Routledge
- Sudarminta. 2004. "Pendidikan Moral di Sekolah Jalan Keluar Mengatasi Krisis Bangsa" dalam Tonny D. Widiastono (ed), *Pendidikan Manusia Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Suyanto & Hisyam, Djihad. 2000. *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium III*. Yogyakarta: Adi Cita.
- Th. Sumartana, dkk., 2001. *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Interfidei.



- Tilaar, H.A.R. 1998. *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wahid, Abdul. 2002. *Pluralisme Agama, Pascamodernisme, dan Pendidikan Agama di Indonesia*. Tesis Magister, Yogyakarta: UNY.
- Weiner, Myron (ed). 1966. *Modernization: The Dynamics of Growth*. Cambridge: Voice of America Forum Lecture.
- Zamroni, 2001. *Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.